



Buletin

Edisi 296
Juni 2019

Isen Mulang

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi
dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

GUBERNUR OPTIMIS KALTENG BEBAS KABUT ASAP
2019_____3

Apel Besar dan Halal Bihalal ASN Lingkup Pemprov
Kalteng_____4

Gubernur : Penggunaan Anggaran Harus Memberi
Manfaat Untuk Masyarakat_____5

Gubernur : Perlindungan Sosial, Elemen Penting
Dalam Kebijakan Publik_____6

Gubernur Serahkan Draf Raperda LPj APBD 2018
Kepada DPRD Kalteng_____7

Gubernur : SOPD Harus Lakukan Penyesuaian
Menghadapi Era Revolusi Industri_____8

Sekda Kalteng Lantik 89 Pejabat Administrator dan
Pengawas_____8

Sekda Kalteng : Pelajar dan Pendidik Berperan Aktif
Tangkal Radikalisme_____9

Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Kerja
Wantimpres_____10

Pemprov Kalteng Optimalkan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi_____11

Pemprov Kalteng Bentuk Satgas Penanganan Karhutla
2019_____12

Uji Publik Raperda Prov Kalteng Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum_____12

Sekda Kalteng : Pemerintah Serius Dalam
Pengamanan Informasi Publik_____13

Gubernur Terus Dukung Aparat dan Masyarakat
Perangi Narkotika_____14

Pemprov Kalteng Menargetkan Penurunan Angka
Stunting 2023 Menjadi 20 Persen_____15

Gubernur : Pengusaha Harus Miliki Rasa Keadilan dan
Kepekaan Sosial_____16

Wagub Kalteng Tutup FBIM : Masyarakat Kalteng
Orang Hebat_____17

Gubernur Sugianto : Lestarkan Budaya Demi Masa
Depan Kalteng_____18

Pemprov Kalteng Pecahkan Rekor MURI Bakar Jagung
Terbanyak_____19



biropkp.kalteng.go.id



sekretariat.daerah.kalteng



@biropkp_kalteng



protokol komunikasi publik kalteng



buletin.isenmulang@gmail.com

GUBERNUR OPTIMIS KALTENG BEBAS KABUT ASAP 2019

Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sehingga masyarakat Kalteng pun dapat terbebas dari dampak buruk kabut asap. Pada tahun 2019, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran tetap dengan komitmen yang sama mengajak seluruh masyarakat dan aparaturnya untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah BEBAS KABUT ASAP.

Hal ini disampaikan Gubernur Sugianto Sabran ketika membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi dan Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis pagi (20/6/2019) yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polhukam RI Brigjen Pol. Bambang Sugeng.

Gubernur Sugianto Sabran di hadapan peserta Rakor dan Peningkatan Pengendalian Karhutla tersebut menjabarkan beberapa hal yang harus dipersiapkan sejak dini dalam menyikapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta mencegah dampak buruk kabut asap berkepanjangan.

Selain itu Sugianto juga berpesan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota agar dalam menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan melalui koordinasi di tingkat Kabupaten dan Kota. “Perhatikan peringatan dini yang sudah ada, terutama warning mengenai potensi terjadinya el-nino moderat pada tahun 2019, jangan sampai terlambat menetapkan status”, tegasnya.

Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta mengintensifkan patroli, sosialisasi, penyadartahuan dan berbagai langkah pencegahan, deteksi dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan. “Jika status siaga darurat sudah ditetapkan Bupati dan Walikota, segera bentuk Satgasnya dan aktifkan Posko, bentuk pos-pos lapangan pada desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan”, pesannya.

Upaya peningkatan pengendalian Karhutla juga memerlukan optimalisasi peran Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Relawan maupun Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pencegahan dan pemadaman dini dengan pendekatan serta penyadaran kepada masyarakat dan sikap sigap untuk bertindak demi menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten dan Kota masing-masing.

Gubernur Sugianto mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalteng akan menetapkan status siaga darurat jika Pemerintah Kabupaten dan Kota sudah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Gubernur menegaskan dirinya akan memimpin langsung Satgas Karhutla Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk itu ia meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar memonitor perkembangan penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta segera mengajukan penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi apabila telah memenuhi syarat demi

mewujudkan sinergitas penanganan kebakaran hutan dan lahan. “Meskipun ancamannya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018 karena kemungkinan terjadinya el-nino moderat, tetapi saya percaya dengan sinergitas kita semua, maka kita dapat mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap 2019”, kata gubernur.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polhukam Brigjen. Pol. Bambang Sugeng mengungkapkan di wilayah Kalimantan Tengah hanya terdapat beberapa Kabupaten yang memiliki lahan gambut dan masih ada beberapa masyarakat yang memiliki kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. “Sudah disarankan alih teknologi, jadi membuka lahan dengan teknologi, tapi untuk menuju ke arah sana perlu proses. Harus dibedakan, mana yang perorangan untuk kepentingan mereka makan dan mana yang mengatasnamakan masyarakat tertentu tapi ternyata korporasi. Jangan sampai kejahatan dengan membakar hutan, akhirnya masyarakat yang jadi korban”, tegas Bambang Sugeng secara gamblang.

Dijelaskan, tahun 2015 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No : 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Instruksi itu bertujuan melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pencegahan dan pemadaman serta penanganan pasca kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan.

Disamping itu terus meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat kegiatan pembakaran hutan dan lahan. “Instruksi Presiden ini dalam rangka mengakomodir tim satgas terpadu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Hasilnya pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 tidak terjadi kebakaran hutan yang parah seperti tahun 2015”, tutur Bambang Sugeng.

Bambang Sugeng juga mengatakan bahwa pihaknya juga nanti akan meminta data kepada BMKG. “Mulai bulan Juli-Agustus di Kalimantan Tengah ini prediksi kemaraunya seperti apa sehingga nanti bisa diputuskan oleh Pak Gubernur ditetapkan siaga diniantisipasi kabut asap akibat kebakaran hutan” ujarnya.

Dikemukakan, salah satunya Rencana Aksi tahun 2019 adalah mendesak untuk antisipasi El-nino 2019 di antaranya mendorong penetapan Siaga Darurat lebih awal di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan patroli lapangan di desa rawan dengan patroli terpadu, patroli rutin dan patroli udara, melanjutkan proses penegakan hukum kasus-kasus yang belum tuntas maupun kasus baru serta meningkatkan upaya manajemen gambut dan melanjutkan diplomasi di tingkat regional dan internasional terkait pengendalian Karhutla.***

Apel Besar dan Halal Bihalal ASN Lingkup Pemprov Kalteng



Palangka Raya – Biro PKP. Mengawali hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idul Fitri 2019, sekitar 5.000 ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Pegawai Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD mengikuti Apel Besar yang dilanjutkan dengan Halal Bihalal ASN Pemprov Kalteng di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (10/06/2019).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya di hadapan ribuan ASN tersebut menegaskan bahwa Apel Besar dan Halal Bihalal merupakan momentum untuk mendisiplinkan ASN termasuk Tenaga Kontrak

sekaligus menumbuhkan kerukunan dan persaudaraan. “Dengan pengalaman bagi yang berpuasa dilanjutkan kewajiban Zakat Fitrah yang membuahkan kesalehan sosial dan dirayakan dengan Idul Fitri serta Halal Bihalal saling memaafkan, membuahkan rasa kasih sayang penguat persaudaraan sesama anak bangsa”, tegas Wagub Kalteng.

Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya meminta ASN termasuk Tenaga Kontrak terus meningkatkan disiplin waktu dan disiplin kerja sehingga ASN benar-benar menjadi pekerja yang profesional dan terhormat. Peningkatan keprofesionalan ASN harus ditunjang dengan sarana dan prasarana serta kebersihan kantor. “Kerapian dan kebersihan kantor harus dilaksanakan oleh seluruh SOPD termasuk di lingkungan sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan publik”, jelas Habib Ismail.

Seusai memimpin Apel Besar dan Halal Bihalal, Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya didampingi sejumlah Kepala SOPD Provinsi Kalteng melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah SOPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kantor SAMSAT Palangka Raya.

Sidak tersebut untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar. “Sidak ini untuk memastikan kesiapsiagaan ASN lingkup Pemprov Kalteng dalam hal memberikan pelayanan umum dan memastikan efektivitas kerja setelah libur dan cuti bersama”, terang Habib Ismail.

Sebagian masyarakat tidak bisa mengurus pembayaran pajak dan perizinan selama cuti bersama beberapa hari lalu. Karena itu jangan sampai terjadi pelayanan masyarakat tidak maksimal pada hari pertama masuk kerja. “Berdasarkan peninjauan kami, terlihat pelayanan publik masih berjalan lancar bahkan di beberapa instansi seperti di Samsat ada kemajuan”, jelas Wagub.

Sementara itu Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan dengan dimulainya Apel Bersama ASN lingkup Pemprov Kalteng, menandai semua aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal. “Cuti bersama yang telah berlalu diharapkan memberikan energi baru bagi ASN dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat”, kata Fahrizal Fitri.***



Gubernur : Penggunaan Anggaran Harus Memberi Manfaat Untuk Masyarakat



PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah kembali menggelar Rapat TEPRA untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN, APBD Kabupaten dan Kota se-Kalteng serta melihat realisasi fisik dan keuangannya.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika memimpin Rapat TEPRA di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (14/06/2019) menegaskan, selain memonitor dan mengevaluasi percepatan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana APBN dan APBD termasuk realisasi fisik dan keuangannya, Rapat TEPRA ini juga sebagai forum evaluasi, fasilitasi dan pembinaan dengan menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota menetapkan realisasi fisik dan keuangan

pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng hingga Mei 2019 sebesar 30 persen. Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah menghimbau stakeholders terkait agar melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan yang harus disusun secara realistis dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. “Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor : 41 tahun 2017”, tegas Gubernur.

Selain itu para pemangku kepentingan diminta selalu

berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi antar kegiatan yang didanai APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalteng. “Pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun”, beber Sugianto Sabran.

Faktor penentu lainnya adalah upaya mengevaluasi capaian realisasi anggaran untuk mengetahui capaian realisasi anggaran tersebut sesuai target atau tidak sehingga dapat dicarikan solusi atas permasalahan yang menyebabkan capaian tidak sesuai target yang telah ditetapkan. “Bagi Perangkat Daerah Pengusul DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 agar seluruh usulan dilakukan melalui Aplikasi Krisna yang telah disiapkan dengan baik termasuk data pendukungnya serta memperhatikan batas waktu penyampaian usulan”, imbuh Gubernur.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ridwan Manurung menjelaskan target realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng untuk Triwulan I sebesar 20 %, Triwulan II 50 %, Triwulan III sebesar 85 % dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100 % fisik dan keuangannya.***



Gubernur : Perlindungan Sosial, Elemen Penting Dalam Kebijakan Publik.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang mampu.

Perlindungan sosial sebagai sebuah kebijakan publik merupakan satu tipe kebijakan sosial dalam berbagai bentuk pelayanan dan ketetapan atau program yang dikembangkan pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan kelompok masyarakat lemah dan kurang mampu.

“Perlindungan sosial adalah paket kebijakan negara yang harus mencakup seluruh warga negara sejak berada dalam kandungan hingga meninggal dunia. Karena menjadi bagian kebijakan, maka perlindungan sosial harus diorganisir oleh negara melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah”, tegas Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy di hadapan peserta Rapat Koordinasi Perlindungan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Kamis (20/06/2019).

Bentuk program perlindungan sosial sudah banyak diberikan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program Perlindungan Sosial yang paling dikenal masyarakat adalah Beras Untuk Orang Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Indonesia Sehat (KIS),

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, Program 1 Juta Rumah dari Kementerian PUPR dan program lainnya.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah, penduduk Kalimantan Tengah dapat melihat dari sisi akses, kuantitas dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan anak dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Perlindungan sosial juga digunakan menjadi alat untuk mengukur keseriusan negara kepada daerah. “Oleh karena itu negara seyogyanya menjamin dan melindungi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dengan prinsip tidak ada yang tertinggal satu orangpun dalam program-program perlindungan sosial di provinsi Kalimantan Tengah”, tegas Sugianto Sabran.

Karena itu diperlukan adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan citra positif pelaksanaan program perlindungan sosial tersebut. “Untuk itu sangatlah penting adanya upaya-upaya terpadu dan terkoordinasi dari para pemangku kepentingan secara berjenjang dalam menunjang berbagai kebijakan dan program kerja

pemerintah terutama terhadap program perlindungan sosial bagi masyarakat yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan”, beber gubernur.

Diharapkan Rapat Koordinasi Perlindungan Sosial provinsi Kalteng 2019 itu dapat menciptakan satu kesatuan pemahaman dan terintegrasinya program-program perlindungan sosial di provinsi Kalteng sehingga Misi Ke-4 dalam pengentasan kemiskinan dapat terwujud menuju Kalteng Berkah. “Saya berharap kita semua dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya dalam program perlindungan sosial bagi masyarakat”, kata Sugianto Sabran.

Rapat Koordinasi Perlindungan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2019 itu diikuti Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait, Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng serta Bagian Kesra dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Kalteng dengan narasumber Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ade Rustama dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi.***



Gubernur Serahkan Draf Raperda LPj APBD 2018 Kepada DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Senin (10/06/2019).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mewakili Gubernur telah menyerahkan Naskah Raperda tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah H.Abdul Razak yang disaksikan Anggota DPRD Kalteng, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Unsur Forkopimda serta sejumlah Kepala SOPD dan Pimpinan Instansi Vertikal pada Rapat Paripurna Dewan tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir.

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis



disampaikan Wagub Habib Ismail Bin Yahya mengatakan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2017 yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Rp 4,68 Trilyun lebih dengan Realisasi Pendapatan Rp 4,41 Trilyun lebih atau 106,07 % dari target Rp 4,97 Trilyun lebih. Sedangkan Anggaran Belanja Rp 4,54 Triliun lebih atau 91,36 % dari target Rp 4,97 Triliun lebih.

Dijelaskan, target dan realisasi Anggaran Pendapatan tersebut antara lain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah Rp 161 Triliun lebih atau 115,23 % dari target Rp 1,40 Triliun lebih. Kemudian Dana Perimbangan Rp 2,90 Triliun lebih atau 100,72 % dari target Rp 2,88 Triliun lebih, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 157,56 miliar lebih atau 126,80 % dari target sebesar Rp 124,26 miliar lebih.

Plafond dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi

Belanja Tidak Langsung Rp 2,37 Triliun lebih atau 91,32 % dari target Rp 2,60 Triliun lebih) dan Belanja Langsung Rp 2,17 Triliun lebih atau 91,41 % dari target Rp 2,37 Triliun lebih. Sedangkan rincian dari Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Rp 468,24 Miliar lebih atau 100 % dari target Rp 568,24 Miliar lebih dan Pembiayaan Netto Rp 568,24 Miliar lebih atau 100,89 % dari target Rp 563,24 Miliar lebih sehingga Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp 698,70 Miliar lebih.

Naskah lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan Pemerintah Provinsi kepada Pimpinan DPRD Kalteng itu terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang seluruhnya telah dilakukan perbaikan dan koreksi sesuai hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Habib Ismail mempersilakan pihak DPRD Kalteng untuk meneliti Naskah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2018 itu sesuai mekanisme yang berlaku dan jadwal pembahasan yang telah ditentukan. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalteng H.Abdul Razak menyatakan pihaknya akan membahas Naskah Raperda tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan dan tata tertib Dewan.***

Gubernur : SOPD Harus Lakukan Penyesuaian Menghadapi Era Revolusi Industri

Palangka Raya – Biro PKP. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalteng untuk kesekian kalinya menyelenggarakan sosialisasi aplikasi Sistem Kompetensi (Sikompeten) Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalteng di Aula BPSDM Kalteng, Jumat (14/6/2019).

Sosialisasi Aplikasi itu bertujuan menginventaris kompetensi ASN sekaligus sebagai media untuk mendukung pelaksanaan Diklat di Provinsi Kalimantan Tengah dan penyimpanan Data ASN sesuai amanat UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aplikasi ini memuat proses dan tahapan aplikasi SIKOMPETEN tentang pengisian Biodata dan Riwayat Peserta yang bisa digunakan sebagai media E-learning (sistem Diklat jarak jauh). “Selain itu sebagai upaya melakukan penataan dan update data kompetensi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan kompetensi ASN yang didasarkan pada data yang

valid dan up to date (data based policy) yang sudah digunakan dalam kegiatan Diklatsar CPNS I, II dan Diklat PIM tahun 2019”, ungkap Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Sri Widanarni.

Sri Widanarni mengharapkan pelaksanaan SIKOMPETEN ini mampu mengefektifkan upaya inventarisir data kediklatan PNS dan mempermudah pelaksanaan kediklatan yang dilakukan BPSDM tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di hadapan peserta Sosialisasi Sistem Kompetensi ASN tersebut menyatakan dalam era Revolusi Industri 4.0 diperlukan pembaharuan pola kerjasama dengan berbagai pihak terutama dalam hal inovasi. “Untuk itu perangkat daerah Pemprov Kalteng dituntut melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan dalam menghadapi era tersebut, terutama dalam hal penataan dan pengajian data SDM PNS sehingga inovasi yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Kalteng dengan Sikompeten

adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban yang harus terus dikembangkan dan didukung oleh semua pihak”, kata Gubernur.

Melalui sistem teknologi informasi ini maka upaya pengembangan kompetensi ASN ke depannya betul-betul menggunakan data yang valid dan up to date sebagai basis pengambilan keputusan (Data based policy). “Dengan tertatanya data kompetensi tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, maju serta berkualitas sebagai salah satu tujuan utama Kalteng Berkah”, tuturnya

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu juga berharap sosialisasi Sistem Kompetensi ASN khususnya Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng agar betul-betul mendukung dan melakukan input data dengan baik sebagai upaya bersama melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap sistem dan mekanisme kerja organisasi sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.***

Sekda Kalteng Lantik 89 Pejabat Administrator dan Pengawas

PALANGKA RAYA – Fitri. BIRO PKP. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri atas nama Gubernur Kalimantan Tengah melantik dan mengambil Sumpah/Janji 34 orang Pejabat Administrator dan 55 orang Pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis sore (27/06/2019).

“Saya mengharapkan para pejabat yang telah dilantik dapat memberikan kesegaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena peningkatan pelayanan dirasakan masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan antara lain dengan menempatkan PNS yang berkualitas dan profesional dalam jabatan yang sesuai kapasitas dan kompetensinya,” ujar Fahrizal

Fitri. Diingatkan, Pejabat yang dilantik merupakan aparatur pilihan yang diberikan kepercayaan untuk mengemban suatu jabatan dan hal tersebut merupakan sistem pembinaan dan pengembangan karir bagi Aparatur Sipil Negara. “Kepercayaan yang diembankan di pundak Saudara agar dapat dilaksanakan dengan menunjukkan prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tunjukkan bahwa Saudara sekalian memang benar-benar orang pilihan dengan mewujudkan program dan kegiatan yang ada di lingkungan kerja dalam waktu yang cepat disertai dengan cara yang tepat dan mampu melakukan peningkatan pelayanan yang prima untuk kemajuan daerah,” pesan Sekda.

Sekda menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan uji kompetensi (job fit) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dan saat ini prosesnya tinggal menunggu menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak lanjut dari UU ASN sekaligus sebagai komitmen untuk penyelenggaraan manajemen ASN berbasis “Sistem Merit”. Pengaturan Manajemen PNS melalui peraturan pemerintah ini, bertujuan untuk menghasilkan PNS yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek

KKN, dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan public serta tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan proses pembinaan kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu pada regulasi tersebut. Oleh karenanya, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja semua pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng serta semua PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar menentukan keputusan dan kebijakan proses pembinaan ASN terukur dalam hal promosi dan mutasi adalah pertimbangan obyektivitas, kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.***



Sekda Kalteng : Pelajar dan Pendidik Berperan Aktif Tangkal Radikalisme

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara kontinyu melakukan upaya menangkal dan menanggulangi segala bentuk radikalisme dan terorisme melalui berbagai program antara lain bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) provinsi Kalteng menyelenggarakan Lomba Video Pendek dan Diskusi Film bagi kalangan Pelajar SMA/SMK/MAN Sederajat di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (27/06/2019).

Kegiatan yang mengusung tema “Satu Indonesia” itu melibatkan partisipasi pelajar dengan tujuan mendorong pelajar dan tokoh pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan terorisme di lingkungannya serta menanamkan kecintaan para pelajar terhadap bangsa dan negara sehingga tidak mudah terpengaruh paham-paham radikal yang muncul disekitarnya.

Selain itu untuk memberikan perhatian kepada para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya sekaligus sebagai sarana perpaduan gagasan dalam pencegahan paham radikalisme serta meningkatkan sinergitas antara lembaga dalam merumuskan langkah kebijakan

untuk pencegahan terorisme khususnya di provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutan tertulis disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun di hadapan peserta lomba mengatakan proses pembangunan nasional berkelanjutan dalam rangka tercapainya tujuan nasional ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

“Kondisi lainnya yang sangat diperlukan adalah terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat termasuk isu dan gangguan keamanan yang terkait dengan radikalisme dan terorisme” tegas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri.

Beberapa faktor kondisional yang berpotensi menimbulkan sikap ekstrem, kekerasan dan radikal antara lain disebabkan oleh kenakalan remaja usia pancaroba atau usia perkembangan untuk mencari jati diri dalam kehidupannya,

bahkan keragaman etnis, agama dan komunitas lokal juga dapat menimbulkan intoleransi dalam interaksi antar masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan tindakan ekstrim, kekerasan dan radikal. “Salah satu upaya pencegahan teroris yang perlu dilakukan adalah penyebarluasan informasi mengenai terorisme kepada tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh agama, budayawan dan para pelajar”, imbuhr Fahrizal Fitri.

Partisipasi aktif pelajar dalam lomba ‘Video Pendek dan Diskusi Film’ itu diharapkan dapat menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap budaya bangsa dan negara Indonesia. “Upaya pencegahan terorisme dari berbagai bidang diharapkan dapat memutus rantai atau jaringan terorisme termasuk upaya cegah dan deteksi dini serta penanggulangannya secara cepat”, beber Sekda.

Membangun dan memperkuat penanaman nilai-nilai budaya damai melalui pemahaman tentang kearifan lokal dibawah nilai-nilai Pancasila serta mendorong terbentuknya komunitas budaya damai merupakan salah satu bagian penting dari upaya pencegahan terorisme dan radikalisme di lingkungan masyarakat.***

Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Kerja Wantimpres.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. 11 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pertahanan dan Keamanan bersama Tim Kajian yang dipimpin Letjen (Purn) M.Yusuf Kartanegara mengunjungi provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (18/06/2019).

M.Yusuf Kartanegara dalam pertemuannya dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang didampingi sejumlah Pimpinan SOPD terkait menjelaskan kunjungan kerja timnya ke Kalteng dimaksudkan untuk menggali dan mengetahui secara langsung situasi dan kondisi terkini terkait upaya Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Era Digital di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kunjungan Kerja Wantimpres dan Tim Kajian tersebut bertujuan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna menyusun kajian tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Untuk Memperkokoh NKRI yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan

negara di bidang pertahanan dan keamanan.

M. Yusuf Kartanegara saat pertemuan dengan Pemerintah Kalimantan Tengah mengatakan dalam melaksanakan tugasnya, pihaknya berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemda terkait aspek Hankam untuk mendalami dan membahas penyusunan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. “Data tentang peningkatan bela negara ini kami perlukan untuk mendukung pelaksanaan program kajian yang sedang kami laksanakan dengan topik peningkatan bela negara di era digital. Data yang di dapatkan di Kalteng ini akan digunakan untuk melengkapi data yang sudah didapatkan dari sumber-sumber yang lain. Hasil kajian ini nanti akan digunakan dalam penyusunan nasehat dan pertimbangan kepada Pak Presiden”, ungkap M.Yusuf Kartanegara.

Anggota Wantimpres dan Tim Kajian tersebut juga menghimpun dan ingin mengetahui secara langsung tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam usaha peningkatan kesadaran bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu Gubernur

Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai pemahaman terhadap Pancasila sangat penting terlebih di zaman digitalisasi sekarang ini. “Bicara tentang pertahanan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Seperti sumber daya alam di Kalimantan Tengah masih digali saja oleh perusahaan, namun belum mendatangkan keadilan ekonomi karena fasilitas di daerah masih minim. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap daerah lainnya”, tegas Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng juga menjelaskan persoalan lain yang terkait dengan keamanan adalah narkoba yang masih menjadi tantangan untuk diperangi dan dibersihkan dari Kalimantan Tengah. “Narkoba menjadi permasalahan serius bagi negara selain terorisme”, ungkap gubernur.

Wantimpres dan Tim Kajian dalam kunjungan kerjanya mulai tanggal 18 hingga 21 Juni 2019 ke Kalteng itu mengunjungi beberapa SOPD Provinsi Kalteng dan Instansi Vertikal antara lain Kesbangpol, Disdik, Korem 102/Pjg, Mapolda Kalteng, BNNP Kalteng, Kanwil Agama dan Kabinda Provinsi Kalimantan Tengah.***



Pemprov Kalteng Optimalkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mengoptimalkan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional yang berkarakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara menuju pemerintahan yang baik “Good Governace” dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tenggara mengatakan hal tersebut ketika membuka Optimalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang diselenggarakan Biro Organisasi Setda Kalteng di Palangka Raya, Kamis (27/06/2019).

“Saya berharap kegiatan ini menjadi forum atau tempat untuk menyamakan pemahaman, memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah serta dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai individu maupun sebagai organisasi”, ungkap Sekda Kalteng.

Reformasi Birokrasi merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari pemerintah sehingga diharapkan Indonesia tahun 2025 berada pada fase yang benar – benar bergerak menuju negara maju dengan pemerintahan berkelas dunia. Pemerintahan berkelas dunia adalah pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat serta mampu

menghadapi tantangan abad ke – 21 melalui tata pemerintah yang baik pada tahun 2025. “Karena itu diperlukan upaya luar biasa dalam menata ulang proses birokrasi dan aparturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. Untuk itu diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja”, tegas Fahrizal Fitri.

Sekda Kalteng mengharapkan Optimalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ini benar – benar dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dan bertukar informasi sekaligus menggali masukan dan saran dalam rangka mengoptimalkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup pemprov Kalteng.

Demikian juga kepada nasrasumber diharapkan agar tidak segan – segan memberikan masukan dan ide – ide konstruktif bagi jajaran Aparatur Sipil Negara dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Optimalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Pemda Kalteng yang diikuti OPD Provinsi Kalteng itu bertujuan memberikan panduan dan pemahaman tentang teknik birokrasi fungsional dan optimalisasi rencana aksi reformasi di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.***



Pemprov Kalteng Bentuk Satgas Penanganan Karhutla 2019

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam rangka menghadapi dampak musim kemarau 2019.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 di Aula BPB – PK Provinsi Kalteng, Selasa (11/06/2019) menegaskan kembali agar semua pihak terkait, jangan sampai terlambat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. “Salah satu faktor penting adalah penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan”, tegas Sekda.

Pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla April 2019, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah meminta pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalteng agar segera menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan

dengan memperhatikan perkiraan musim kemarau dan fenomena el nino yang disampaikan BMKG.

Berdasarkan laporan yang diterima BPB dan PK Provinsi Kalteng, baru tiga Kabupaten yang sudah menetapkan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan masing-masing Kabupaten Barito Selatan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya. “Dengan adanya penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan”, jelas Fahrizal.

Untuk itu sangat strategis dan penting menyamakan persepsi dan aksi antara Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait pembentukan Posko dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla sehingga operasi penanganan darurat bencana Karhutla tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan komitmen

bersama Kalteng Babas Kabut Asap 2019.

Pada Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla 2019 tersebut Fahrizal Fitri menegaskan beberapa hal strategis yang perlu disepakati bersama. Hal-hal yang bersifat strategis itu meliputi struktur Satuan Tugas Posko sehingga komando dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu aktivasi Sektor atau Pos Lapangan oleh setiap Sub Satgas Kabupaten dan Kota. Prioritas perhatian Provinsi dalam aktivasi sektor dan pos lapangan yaitu pada wilayah-wilayah bergambut serta didukung dengan ketersediaan personil dan anggaran Satgas Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla. “Komitmen kita bersama yaitu Kalteng Bebas Kabut Asap 2019 hanya bisa tercapai apabila sinergisitas kita terus menerus dijaga dan semakin ditingkatkan”, ujar Fahrizal Fitri.***

Uji Publik Raperda Prov Kalteng Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dasar, pedoman dan panduan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat terlaksana dengan efektif dan maksimal.

Untuk maksud tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tanggal 21 Februari 2018 Perihal Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan

Wewenang Sat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat tersebut dilakukan Uji Publik. Uji Publik terhadap Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat dan lebih menunjang Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung tujuan pembangunan daerah menuju Kalteng Berkah.

Sekda Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy ketika membuka Uji Publik terhadap Raperda tersebut di Palangka Raya, Selasa (11/06/2019) mengharapkan peserta Uji Publik agar dapat memberikan

masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, Sekda Kalteng juga mengharapkan Sat Pol PP Kalteng agar terus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya selaku abdi negara dan abdi masyarakat sehingga lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang Sat Pol PP dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kalteng Berkah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga akhirnya dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Uji Publik terhadap Raperda tersebut dihadiri berbagai unsur antara lain Anggota DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan dari kalangan pers.***

Sekda Kalteng : Pemerintah Serius Dalam Pengamanan Informasi Publik.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Kamis (13/06/2019).

Sosialisasi yang diikuti Forum Diskominfoantik se-Kalimantan Tengah itu dibuka resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pemerintahan Yuas Elko.

Sosialisasi ini merupakan salah satu bukti perhatian pemerintah daerah yang besar terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya dalam pengamanan informasi publik.

“Perhatian pemerintah terhadap pengamanan informasi publik itu seiring dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya

akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga memerlukan kemampuan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk pengelolaan dan pengamanan informasi publik”, ungkap Sekda Kalteng dalam sambutannya yang disampaikan Yuas Elko.

Era digital pemerintahan (e-government) terus dikembangkan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan menuju Good Governance sehingga tugas lebih efektif dan efisien serta mendorong perubahan fundamental dari sistem manual menjadi sistem online yang dapat diakses oleh publik.

Namun dalam prosesnya seringkali timbul kerawanan informasi yang disebabkan oleh beberapa sebab antara lain informasi yang disampaikan terinterupsi sehingga tidak sampai ke tujuan dan bisa memunculkan hoax atau berita bohong seperti yang terjadi belakangan ini. “Untuk itu kehadiran penyelenggaraan persandian provinsi Kalimantan Tengah sangat diharapkan sebagai upaya pengamanan

informasi agar terjamin keamanan informasi di Kalimantan Tengah dan nasional”, tegas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri.

Peraturan Gubernur Nomor : 11 Tahun 2018 merupakan salah satu perangkat yang dapat dijadikan dasar/pedoman bidang persandian dalam melaksanakan tupoksi yakni pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, menciptakan keharmonisan dalam bidang persandian di lingkungan pemerintah daerah dan membantu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tata cara persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.

“Melalui sosialisasi ini Saya menghimbau dan mengharapkan kerjasama seluruh SOPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dengan Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat meningkatkan pengamanan informasi milik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota,” terang Sekda Kalteng tersebut.***



Gubernur Terus Dukung Aparat dan Masyarakat Perangi Narkotika.

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan menegaskan komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkotika yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

Diungkapkannya, bandar dan pengedar merupakan sumber munculnya narkotika ke wilayah Kalimantan Tengah sehingga memerlukan upaya pemberantasan sampai ke akarnya. “Berantas narkotika ini tidak hanya terhadap pengguna saja, bahkan pengguna bisa mengulangi lagi sehingga harus diobati, tapi berantas barang haram ini dari pengedaranya”, ungkap Sugianto Sabran ketika menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2019 di Gedung Wanita Palangka Raya, Rabu (26/06/2019).

Sugianto Sabran mengharapkan perhatian dan dukungan masyarakat dalam memerangi penggunaan dan peredaran narkotika di Kalimantan Tengah. Diingatkan juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk generasi milenial agar menjauhkan diri dari bahaya penggunaan narkotika yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan hukum.

Gubernur Kalteng kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya menanggulangi penggunaan dan peredaran narkotika serta menyatakan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah siap membantu anggaran

untuk mendukung pemberantasan narkotika di Kalimantan Tengah.

Selain itu juga diminta kepada pemerintah Kabupaten dan Kota agar segera membentuk Badan Narkotika Kabupaten dan Kota. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan tidak ragu mengalokasi anggaran untuk keperluan pemberantasan narkotika.

Sementara itu Kepala BNN Provinsi Kalteng Brigjen Pol. Lilik Heri Setiadi mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai wujud keprihatinan seluruh dunia dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. “Untuk itu dibutuhkan gerakan yang masif serta kepedulian segenap unsur masyarakat sehingga narkotika tidak merusak generasi bangsa”, tegas Lilik Heri Setiadi.

Dikemukakan, kejahatan narkotika melibatkan banyak orang dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional serta terorganisir rapi dan rahasia. “Karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak boleh setengah-setengah, tapi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk instansi pemerintah dan masyarakat”, ujar Lilik Heri Setiadi.

Perang terhadap narkotika antara lain melalui strategi Demand Reduction yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar imun terhadap penyalahgunaan narkotika dan strategi Supply Reduction melalui penegakkan hukum yang



tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera termasuk upaya rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika.

Dijelaskan, sepanjang tahun 2018 BNNP Kalteng telah melaksanakan tugas di bidang Demand Reduction sebagai upaya membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan, sedangkan di bidang Supply Reduction telah dilakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.³³

Kepala BNN Provinsi Kalteng juga mengingatkan generasi milenial harus bisa menggelorakan semangat membara untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa dalam membangun solidaritas sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.^{***}

Pemprov Kalteng Menargetkan Penurunan Angka Stunting 2023 Menjadi 20 Persen



Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan penurunan angka stunting (tubuh kerdil akibat kekurangan gizi) ke kisaran 20 % pada tahun 2023.

Upaya penurunan angka stunting ini mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Kalteng, karena pada tahun 2019 angka stunting di Kalimantan Tengah masih di level 34 %, berada di atas angka stunting nasional yaitu 30,8 %, sehingga menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi provinsi ke lima dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

“Kita berharap lima tahun ke depan, kita bisa mencapai angka (stunting) 20 %. Saya pikir itu (penurunan stunting) harus menjadi perhatian kita, apalagi secara angka nasional, kita agak tinggi dan kita harus lakukan upaya (penanggulangan), karena hal yang utama adalah bicara kesehatan,” ungkap Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(GERMAS) dan Penanggulangan Stunting di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bappedalitbang Provinsi, Kamis (13/06/2019).

Menurut Fahrizal Fitri peran semua pihak (stakeholders) sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan stunting melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sinkronisasi kegiatan dan penganggaran di semua perangkat daerah menjadi syarat mutlak agar program tersebut dapat berjalan secara terpadu dan terarah.

“Penanganan (stunting) ini harus multisektoral, tidak bisa ditangani Dinas Kesehatan sendiri. Forum koordinasi pelaksanaan Gernas dan penurunan angka stunting ini adalah salah satu upaya bagaimana menyinkronkan kegiatan dan penganggaran”, tegas Fahrizal Fitri.

Penanganan stunting yang selama ini mungkin dilaksanakan masing-masing perangkat daerah, nantinya dapat dipadukan supaya betul-betul terarah. “Jangan sampai nanti lokus kegiatan

sesuai pilihan masing-masing. Kita harapkan itu menjadi keputusan bersama, sama-sama mengeksekusinya dari masing-masing sektor,” imbuh Fahrizal.

Lebih lanjut Sekda Kalteng menjelaskan program Gernas dan penanganan stunting akan disusun terintegrasi di seluruh sektor mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga ke tingkat desa. Pemerintah provinsi juga akan melakukan evaluasi lebih rinci terhadap APBD Kabupaten/Kota di bidang kesehatan, terutama yang terkait dengan kegiatan peningkatan pola hidup sehat dan penanggulangan stunting.

Fahrizal Fitri juga menegaskan tujuan semua sektor akan terintegrasi sesuai tupoksi masing-masing dan akan mendelegasikan kegiatan (Gernas dan penanganan stunting) ini sampai ke Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa serta akan berusaha menggerakkan semua penganggaran melalui APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk juga dana desa dan CSR perusahaan.

“Nantinya kita akan arahkan dan betul-betul kita perhatikan. Kalau selama ini berkenaan dengan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, kita cuma melihat seberapa jauh penganggaran di bidang kesehatan 10 % dari APBD mereka. Sekarang kita akan melihat rinciannya dari 10 % itu, apakah kegiatannya memang sudah terinci untuk menuju pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau pun upaya-upaya melakukan intervensi stunting,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri.***

Gubernur : Pengusaha Harus Miliki Rasa Keadilan dan Kepekaan Sosial

Palangka Raya – Biro PKP. Geliat investasi dan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat bergantung dengan kondisi yang aman, tertib dan tegaknya hukum sehingga pembangunan nasional dan daerah bisa berkelanjutan.

Namun investasi ekonomi khususnya di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan seperti sengketa lahan, penyerobotan dan kriminalisasi.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI Kalteng) Kalimantan Tengah yang melakukan aktivitas pendampingan kepada beberapa komunitas masyarakat di Kabupaten Kapuas, Seruyan, Kotawaringin Timur, Barito Timur dan Kabupaten Katingan mensinyalir adanya penyerobotan, kerusakan lingkungan dan kriminalisasi.

Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran beserta sejumlah Kepala SOPD terkait dalam silaturahminya

dengan Direktur Eksekutif WALHI Kalteng Dimas N.Hartono dan beberapa komunitas masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya tersebut menegaskan akan menyelesaikan kasus sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat termasuk kerusakan lingkungan.

Sugianto Sabran mengatakan pemerintah provinsi Kalteng akan menurunkan Tim untuk mengecek kebenaran kasus tersebut. “Pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan menurut Tim ke beberapa daerah untuk mengecek kebenaran kasus tersebut”, ujarnya kepada Wartawan seusai silaturahmi dengan Jajaran WALHI Kalteng di Palangka Raya, Jumat (28/06/2019).

Upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut dilakukan melalui persuasi dan mediasi. “Jangan sampai pemerintah mengambil tindakan hukum secara tegas dan pencabutan ijin usaha perusahaan”, kata gubernur.

Sugianto Sabran mengatakan kehadiran investor harus berdampak positif bagi Kalimantan Tengah. “Kehadiran dan keberadaan investor ke Kalimantan Tengah harus berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan ekonomi serta menciptakan rasa keadilan dan kepekaan sosial kepada masyarakat, bukan sebaliknya membuat sulit pemerintah dan masyarakat”, beber Sugianto Sabran.

Untuk itu Gubernur Kalteng meminta para pemilik perusahaan khususnya di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan agar mentaati aturan dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, bekerja dengan hati yang jujur dan sabar. “Pengusaha harus memiliki kepedulian, rasa keadilan dan kepekaan sosial. Bahkan dengan mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini diambil atau diabaikan, tidak akan membuat pengusaha itu bangkrut”, tegas Sugianto Sabran.

Demikian juga di sektor pertambangan diharapkan agar pengusaha sektor pertambangan memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak melakukan aktifitas penambangan secara tidak bertanggungjawab seperti di sungai atau lokasi lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku.***



Wagub Kalteng Tutup FBIM : Masyarakat Kalteng Orang Hebat

Palangka Raya – Biro PKP. Festival Budaya Isen Mulang yang digelar tanggal 17 s.d 22 Juni di Kota Palangka Raya dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-62 Provinsi Kalteng tahun 2019, berakhir dan ditutup resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (22/06/2019).

Festival Budaya Isen Mulang yang ke-26 kalinya digelar sejak tahun 1993 itu diikuti 2.250 peserta utusan Kabupaten dan Kota se-Kalteng, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Sanggar dan Paguyuban, Organisasi Masyarakat, Swasta, Perguruan Tinggi, Pelajar dan Kaum Milenial.

Kontingen Kabupaten Barito Utara kembali meraih Juara Umum Festival Budaya Isen Mulang 2019 dengan menyabet 11 Cabang Lomba serta berhak atas hadiah sebesar Rp.50.000.000,- dari Panitia dan memboyong kembali Piala Bergilir Gubernur Kalimantan Tengah untuk diperebutkan kembali dalam event yang sama tahun 2020 di Palangka Raya.

Festival yang menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya lokal yang dibalut dengan kreasi dan inovasi sesuai tuntutan selera zaman itu terus mengalami peningkatan jumlah pesertanya maupun kualitas yang ditampilkan.

Hajatan Budaya bertajuk Festival Budaya Iseng Mulang (FBIM) 2019 itu dimaknai oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud komitmen menjaga dan melestarikan nilai budaya dan adat istiadat di tengah gempuran budaya modern.

Festival Budaya ini juga sebagai ajang pembuktian masyarakat Kalimantan Tengah masih teguh memegang adat

istiadatnya sehingga dirasa perlu untuk melestarikan adat, seni, budaya dan tradisi kepada generasi mudanya.

Event yang mengambil tema “Eksistensi Kearifan Lokal Menuju Kalteng Berkah” ini selain untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya, juga sebagai sarana pengembangan inovasi dan kreativitas bidang seni budaya, kearifan lokal dan kuliner Dayak Kalteng yang terprogram, terarah, terukur, kontinyu dan universal.

Perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Tim Callender of Event) Takbir Abdullah Anwar menyatakan Festival Budaya Isen Mulang merupakan salah satu event tahunan terbaik yang pernah ditemuinya. “Event ini mari terus dilestarikan dan ditingkatkan. Branding, advertising dan selling pun harus kita jalankan sebagai strategi untuk pemasaran pariwisata di daerah ini,” ujarnya saat menghadiri penutupan FBIM tersebut.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya ketika menutup Festival Budaya Isen Mulang itu mengatakan

masyarakat Kalteng adalah orang yang hebat. “ Di Bumi Tambun Bungai tidak kekurangan orang hebat. Banyak sekali generasi penerus yang sangat mencintai budaya di Kalteng ini”, tegas Habib Ismail.

Habib Ismail atas nama pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh SOPD, Panitia serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah yang telah bekerja keras sehingga Festival tersebut berjalan lancar. “Seluruh masyarakat Kalteng harus bersama-sama untuk lebih memeriahkan event tahunan ini yang dinilai sebagai salah satu festival budaya terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi dan senantiasa sukses,” ucapnya.

Penutupan FBIM itu dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, Sekda Kalteng, Ketua DPRD Kalteng, Wakil Walikota Palangka Raya, Kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng serta Wakil Bupati se-Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, masyarakat, TNI/Polri.***



Gubernur Sugianto : Lestarikan Budaya Demi Masa Depan Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran didampingi Ketua TP PKK Provinsi Ibu Ivo Sugianto Sabran membuka secara resmi Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) tahun 2019 yang ditandai dengan pemukulan Katambung (alat musik khas Dayak) di Taman Budaya Temanggung Tilung Palangka Raya, Senin malam (17/06/2019).

FBIM ini merupakan agenda pariwisata utama tahunan Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-62 Provinsi Kalimantan Tengah. FBIM sudah masuk Calender of Event (CoE) Tingkat Nasional Kementerian Pariwisata, termasuk Festival Babukung di Kabupaten Lamandau. FBIM ini merupakan bentuk upaya Pemprov Kalteng melestarikan, membina dan mengembangkan seni budaya serta mempromosikan pariwisata di Kalimantan Tengah dengan mengusung tema “Eksistensi Kearifan Lokal Menuju Kalteng Berkah.”

Pembukaan FBIM tahun ini tampak sangat semarak dengan berbagai atraksi seni yang ditampilkan mulai dari penampilan Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2019 beserta Jagau dan Bawi Nyai 2019, senandung lagu “Kalimantan Tengahku” hingga puncaknya saat 15 penari, 25 pemusik dan 25 kru produksi dari 15 sanggar se-Palangka Raya berkolaborasi mempersembahkan tarian kolosal bertajuk “Hapakat” yang memiliki makna bersatu padu, bekerja sama serta bergandengan tangan dan menyatukan untuk meraih kesejahteraan melalui kebersamaan menuju Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Elok, religious, Kuat, Amanah dan Harmonis (KALTENG BERKAH).

Penampilan tarian kolosal tersebut benar-benar berhasil memukau dan mendapatkan aplaus sangat meriah dari para penonton yang membanjiri Taman Budaya Kalteng tersebut. “Industri pariwisata itu salah satunya budaya yang kita lihat tadi, mereka pemuda pemudi kita,

mereka sangat kreatif sekali, adik-adik kita, generasi muda, anak-anak kecil yang menari ini (dapat) menjadi kekuatan ekonomi (Kalimantan Tengah) ke depan”, beber Gubernur Sugianto Sabran.

Lebih lanjut Sugianto Sabran mengingatkan semua pihak betapa pentingnya melestarikan dan mengembangkan budaya adat Kalteng agar tidak tergerus budaya asing. “Selain menjadi identitas lokal, budaya yang terjaga itu akan menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan bagi Kalimantan Tengah ke depan”, kata Sugianto.

Sugianto Sabran juga mengatakan Budaya adat itu untuk menjaga peradaban, sedangkan sumber kekayaan (daerah) itu bukan cuma sumber daya alam, tapi juga budaya dan pariwisatanya. “Dengan adanya pariwisata dan budaya yang kita jaga, akan menjadi kekuatan industri ekonomi (Kalimantan Tengah) ke depannya. Tapi ini tidak gampang (memerlukan) kerja sama dari semua pihak”, tegas Gubernur.

Festival Budaya Isen Mulang ini berdampak positif bagi masyarakat dan perkembangan pembangunan. “Saya berharap event di Kalteng ini membawa berkah dan dampak positif bagi masyarakat, perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kunjungan wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuh Sugianto.

Sementara itu Menteri Pariwisata RI melalui Asisten Deputi Pengembangan Wisata Regional II Kalimantan Kementerian Pariwisata Reza Fakhlevi mengaminkan

pernyataan Gubernur Sugianto. “Mudah-mudahan acara (FBIM) ini dapat mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi dalam upaya perlindungan dan pelestarian adat budaya Kalimantan Tengah. Diharapkan event ini (juga) mampu untuk mempromosikan pariwisata Kalteng atau setidaknya dapat memberikan dampak ekonomi, terlebih kepada masyarakat setempat”, beber Asdep Reza Fakhlevi.

Pembukaan FBIM tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Kapolda Irjen. Pol. Anang Revandoko, Danrem 102/PJG Kolonel Arm. Saiful Rizal, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah dan Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran serta sesepuh adat dan budaya. Festival Budaya Isen Mulang ini berlangsung selama enam hari mulai dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juni 2019.

Tercatat 22 jenis lomba yang dipertandingkan pada ajang FBIM 2019 antara lain Karnaval Budaya, Putra Putri Pariwisata, Tari Daerah, Karungut dan 18 lomba lainnya. Berbagai lomba tersebut diikuti tidak kurang dari 2.250 orang peserta dari perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Untuk Karnaval Budaya diselenggarakan Selasa Sore (18/06/2019) menggunakan kendaraan hias yang menampilkan beraneka ragam corak budaya lokal dari 14 kabupaten/kota dan SOPD provinsi. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat peserta karnaval dan antusiasme warga masyarakat menyaksikan pesta budaya tersebut.***



Pemprov Kalteng Pecahkan Rekor MURI Bakar Jagung Terbanyak

Palangka Raya – Biro PKP. Panitia Peringatan Ulang Tahun Ke – 62 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 kembali menggelar Event Akbar dalam rangkaian memperingati Ulang Tahun Kalimantan Tengah tahun 2019.

Event Akbar yang digelar di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi (16/06/2019) tersebut adalah Pemecahan Rekor MURI Bakar Jagung Terbanyak di Indonesia yakni 62.000 tongkol jagung untuk memecahkan rekor sebelumnya dipegang Jember Jawa Timur sebanyak 50.000 tongkol jagung.

Sehubungan dengan keberhasilan memecahkan Rekor MURI Bakar Jagung Terbanyak di Indonesia tersebut, Manajer Operasional MURI Andre Purwandono menyerahkan langsung Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima langsung oleh Gubernur H.Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran

mengharapkan Pemecahan Rekor MURI Bakar Jagung Terbanyak dapat memacu pengembangan dan peningkatan produksi jagung di Kalteng, terlebih lagi Kalteng mendapat jatah dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan jagung seluas 200.000 hektar dan sudah direalisasikan 50.000 hektar.

Produksi jagung Kalteng dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan hingga tahun 2018 mencapai 112 ton. “Untuk itu Bupati dan Walikota diminta terus memotivasi Kepala Dinas Pertanian, masyarakat, penyuluh pertanian dan Sarjana Pertanian agar menggalakkan dan membangkitkan sektor pertanian menuju Kalteng bermartabat”, ujar Sugianto Sabran

Sementara itu Manajer Operasional MURI Andre Purwandono mengatakan pihaknya tiga kali keliling untuk menilai dan menghitung sehingga secara teknis dan penilaian memenuhi syarat untuk memecahkan Rekor MURI yang sebelumnya dipegang

Jember Jawa Timur yakni 50.000 tongkol jagung. “Dengan kegiatan seperti ini, semoga hasil bumi kita akan lebih bisa berkontribusi bagi Indonesia, khususnya bagi Kalteng sehingga kita bisa mengurangi impor dari luar negeri”, beber Andre Purwandono.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalteng Suhartini menjelaskan, Bakar Jagung Terbanyak untuk memecahkan Rekor MURI tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memasyarakatkan bahan lokal sumber karbohidrat yang salah satunya adalah jagung. “Selain itu memberikan dorongan kepada kelompok – kelompok tani yang ada di Kabupaten dan Kota agar tekun dalam usaha tani”, kata Suhartini.

Pemecahan Rekor MURI Bakar Jagung Terbanyak itu diikuti Instansi Vertikal dan SOPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah, Perguruan Tinggi, Perbankan serta media cetak dan elektronik yang ada di Palangka Raya.***



